



Analisis Kontribusi Badan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UO TNI Angkatan Laut dalam Upaya Mempertahankan Opini WTP dari BPK RI

Isma Budiawan

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: udez459@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-09	This study aims to analyze the contribution of the Financial Agency in improving the quality of financial reports within the UO of the Indonesian Navy and to identify the factors influencing efforts to maintain the WTP opinion. This research employs a qualitative approach by conducting interviews with five respondents responsible for financial management within the UO of the Indonesian Navy. Additionally, observations were made regarding the implementation of financial systems, along with an analysis of secondary data related to financial policies within the Navy. The findings indicate that the Financial Agency has implemented various oversight mechanisms and financial policy dissemination efforts, yet challenges remain in effectively implementing these policies. The competence of HR in managing digital financial systems such as the Institutional-Level Financial Application System (SAKTI) and the State Property Management and Accounting System (SIMAK-BMN) still needs improvement through more systematic training. Additionally, financial data reconciliation processes between work units often experience delays due to differences in recording formats and a lack of coordination. Another identified challenge is budget constraints and bureaucratic complexity in following up on BPK audit recommendations, which could potentially impact the overall quality of financial reports.
Keywords: <i>Accountability;</i> <i>Budget;</i> <i>Financial Reports;</i> <i>Internal Control;</i> <i>WTP Opinion.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-09	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Badan Keuangan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UO TNI AL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya mempertahankan opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap lima responden yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan di UO TNI AL. Selain itu, dilakukan observasi terhadap implementasi sistem keuangan dan analisis terhadap data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan keuangan di lingkungan TNI AL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan sosialisasi kebijakan keuangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan secara efektif. Kompetensi SDM dalam pengelolaan sistem keuangan digital seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih sistematis. Selain itu, proses rekonsiliasi data keuangan antarunit kerja sering mengalami keterlambatan akibat perbedaan format pencatatan dan kurangnya koordinasi. Tantangan lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan anggaran dan kompleksitas birokrasi dalam menindaklanjuti rekomendasi audit BPK, yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.
Kata kunci: <i>Akuntabilitas;</i> <i>Anggaran;</i> <i>Laporan Keuangan;</i> <i>Opini WTP;</i> <i>Pengendalian Intern.</i>	

I. PENDAHULUAN

Keuangan negara memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan, khususnya di lingkungan *Unit Organisasi* (UO) TNI Angkatan Laut, pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan efisien menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kredibilitas institusi (Rizaldi, 2023). Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pengelolaan

keuangan suatu institusi pemerintah adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (*BPK RI*). Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah adalah *Wajar Tanpa Pengecualian* (*WTP*), yang mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Hananto, 2021).

Dalam upaya mempertahankan opini *WTP*, UO TNI Angkatan Laut harus memastikan bahwa

sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi, hingga pengawasan dan evaluasi. Fungsi *Badan Keuangan* dalam lingkungan TNI Angkatan Laut memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas (Setiawan et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi prioritas utama guna mempertahankan kepercayaan publik serta menghindari potensi penyimpangan yang dapat mengancam kredibilitas organisasi.

Peran *Badan Keuangan* dalam menjaga kualitas laporan keuangan di UO TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kompleksitas regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*SDM*), hingga penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi (Rokhmawan et al., 2023). Dalam koordinasi antarunit kerja, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta kepatuhan terhadap kebijakan keuangan negara menjadi faktor kunci yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan yang berbasis *accrual basis accounting* sebagaimana diamanatkan dalam standar akuntansi pemerintahan juga memerlukan ketelitian serta pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan (Subhan et al., 2024).

Untuk mempertahankan opini *WTP* dari *BPK RI*, UO TNI Angkatan Laut harus menerapkan strategi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu strategi utama adalah dengan melakukan *internal control* yang ketat melalui pengawasan yang berjenjang dan berlapis (Naz, 2022). Fungsi pengawasan ini melibatkan *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*, *Inspektorat Jenderal*, serta unit-unit pengelola keuangan yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap transaksi keuangan. Selain itu, penerapan sistem keuangan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (*SPAN*) dan *Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*, juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penyusunan laporan keuangan (Arifin et al., 2021).

Di samping aspek teknis, peningkatan kompetensi *SDM* dalam bidang keuangan

menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan dan sertifikasi bagi personel yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan regulasi keuangan negara serta standar akuntansi pemerintahan (Febrianto & Soediantono, 2022). Selain itu, budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme juga harus terus dibangun agar pengelolaan keuangan berjalan dengan prinsip yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hayong et al., 2024).

Koordinasi yang erat antara UO TNI Angkatan Laut dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (*BPK*), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (*BPKP*) menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, melalui sinergi yang baik, berbagai kendala teknis dan administratif dalam pengelolaan keuangan dapat segera diatasi sehingga tidak mengganggu proses audit yang dilakukan oleh *BPK RI* (Utomo et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, UO TNI Angkatan Laut telah berhasil mempertahankan opini *WTP* dari *BPK RI*, yang mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Namun, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal, perubahan regulasi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi (Hayati, 2024). Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas *SDM*, serta penguatan sistem pengendalian internal (Samboga et al., 2023).

Peran *Badan Keuangan* dalam menjaga kualitas laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut sangatlah penting dalam upaya mempertahankan opini *WTP* dari *BPK RI*. Melalui penerapan sistem pengelolaan keuangan yang modern, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian, kredibilitas serta

kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat terus terjaga, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pertahanan negara (Bima Setia Budi, 2024).

Dalam sistem pemerintahan yang modern, pengelolaan keuangan negara dituntut untuk semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan adalah capaian opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)* atas laporan keuangan suatu instansi. UO TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari kementerian pertahanan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa laporan keuangannya tersusun dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (*SAP*), serta bebas dari kesalahan material dan administratif yang dapat berdampak pada hasil audit. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang membuat pencapaian dan pemertahanan opini *WTP* menjadi semakin kompleks (Eko Ibnu Hadi et al., 2024).

Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut adalah masih adanya kendala dalam implementasi *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* yang ketat dan efektif, yang mengakibatkan potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi data antara unit-unit kerja, keterbatasan sumber daya manusia (*SDM*) yang memiliki kompetensi tinggi di bidang akuntansi pemerintahan, serta perubahan regulasi yang cukup dinamis juga menjadi faktor yang dapat menghambat kualitas laporan keuangan. Masih ditemukannya beberapa rekomendasi dari BPK RI yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan UO TNI Angkatan Laut menunjukkan bahwa masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar opini *WTP* dapat terus dipertahankan secara konsisten.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontribusi Badan Keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan dalam upaya mempertahankan opini *WTP* dari BPK RI. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran kebijakan keuangan, efektivitas

pengendalian internal, kapabilitas SDM dalam mengelola laporan keuangan, serta strategi mitigasi terhadap berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi hasil audit BPK RI. Dengan memahami sejauh mana kontribusi Badan Keuangan dalam menjaga integritas dan akurasi laporan keuangan, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat mendukung upaya peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan UO TNI Angkatan Laut.

Dalam ranah akademik dan praktik, terdapat *gap research* yang cukup signifikan terkait dengan analisis spesifik terhadap peran Badan Keuangan dalam mempertahankan opini *WTP* di lingkungan militer, khususnya TNI Angkatan Laut. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada pengelolaan keuangan di institusi sipil, kementerian, atau pemerintah daerah, sedangkan dinamika pengelolaan keuangan di lingkungan militer memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi struktur organisasi, mekanisme anggaran, maupun tantangan administratif yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait bagaimana Badan Keuangan berkontribusi dalam memastikan bahwa laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut tetap memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan persyaratan audit dari BPK RI.

Urgensi dari penelitian ini semakin meningkat mengingat bahwa opini *WTP* bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dalam suatu institusi pemerintahan. Keberhasilan dalam mempertahankan opini *WTP* dapat meningkatkan kredibilitas TNI Angkatan Laut dalam mengelola anggaran negara yang dipercayakan kepadanya, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara. Selain itu, dengan semakin ketatnya regulasi terkait pengelolaan keuangan negara dan semakin intensifnya pengawasan dari lembaga pemeriksa, maka diperlukan upaya yang lebih sistematis dan strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, pelaporan, serta audit keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi teoritis dalam mengisi *gap research*, tetapi juga memiliki dampak praktis yang besar dalam mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan UO TNI Angkatan Laut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam kontribusi Badan Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut dalam upaya mempertahankan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dari BPK RI. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi proses, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan di lingkungan UO TNI Angkatan Laut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima responden yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan di UO TNI Angkatan Laut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut, hasil audit BPK RI, regulasi terkait pengelolaan keuangan negara, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Jabatan/Posisi	Pengalaman (Tahun)	Keterlibatan dalam Laporan Keuangan
1.	Kepala Badan Keuangan	>10 tahun	Bertanggung jawab atas kebijakan keuangan
2.	Auditor Internal	7-10 tahun	Melakukan pengawasan dan evaluasi laporan keuangan
3.	Analisis Keuangan	5-7 tahun	Menyusun dan merekonsiliasi laporan keuangan
4.	Operator Sistem Keuangan	3-5 tahun	Mengelola pencatatan transaksi keuangan
5.	Staf Administrasi Keuangan	3-5 tahun	Mengurus dokumen dan pelaporan keuangan harian

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan lima responden utama menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam mengenai proses pengelolaan laporan keuangan serta peran Badan Keuangan dalam mempertahankan opini *WTP*.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung proses penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan, penerapan *Sistem Pengendalian Intern (SPI)*, serta bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK RI dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, seperti kebijakan keuangan, tantangan dalam penyusunan laporan keuangan, efektivitas *Sistem Pengendalian Intern (SPI)*, serta strategi dalam mempertahankan opini *WTP*.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pola-pola dan hubungan antar variabel dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis, kemudian diverifikasi dengan data sekunder dan hasil wawancara tambahan untuk memastikan akurasi serta validitas hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Badan Keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut guna mempertahankan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dari BPK RI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk implementasi kebijakan keuangan, efektivitas *Sistem Pengendalian Intern (SPI)*, kapabilitas sumber daya manusia (*SDM*), serta tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima responden yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan, observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan hasil audit BPK RI. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana strategi Badan Keuangan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi

untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan UO TNI Angkatan Laut.

Tabel 2. Hasil Observasi

No	Aspek yang Diamati	Temuan Observasi	Implikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
1	Kepatuhan terhadap Regulasi	Sebagian besar prosedur keuangan sudah sesuai dengan regulasi, namun ada keterlambatan dalam pembaruan kebijakan terkait standar akuntansi terbaru.	Berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan dan memerlukan perbaikan dalam sistem pembaruan regulasi.
2	Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Terdapat mekanisme pengawasan internal, tetapi masih ada celah dalam verifikasi dan validasi transaksi keuangan.	Dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan perlu diperkuat dengan pengawasan lebih ketat.
3	Kualitas SDM Keuangan	Sebagian besar staf keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur, tetapi masih terbatas dalam aspek teknis akuntansi pemerintahan.	Mebutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus agar lebih optimal dalam menyusun laporan keuangan.
4	Rekonsiliasi Data Keuangan	Proses rekonsiliasi berjalan dengan baik, tetapi sering mengalami keterlambatan karena koordinasi antarsatuan belum optimal.	Keterlambatan rekonsiliasi dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan memerlukan perbaikan dalam sistem koordinasi.
5	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit BPK	Upaya perbaikan atas rekomendasi BPK telah dilakukan, namun implementasinya masih memerlukan waktu lebih lama dari yang ditargetkan.	Dapat berdampak pada penilaian opini BPK di masa mendatang jika tidak segera ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif.

Berdasarkan Tabel 2, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar prosedur keuangan di UO TNI Angkatan Laut telah sesuai dengan regulasi, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar kualitas laporan keuangan semakin optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterlambatan dalam pembaruan kebijakan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi terbaru, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan. Selain itu, meskipun *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* telah diterapkan, masih ditemukan celah dalam verifikasi dan validasi transaksi keuangan, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Dari segi sumber daya manusia (*SDM*), staf keuangan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang prosedur administrasi keuangan, tetapi masih memerlukan peningkatan keterampilan dalam aspek teknis akuntansi pemerintahan melalui pelatihan yang lebih intensif. Proses rekonsiliasi data keuangan juga menjadi perhatian karena sering mengalami keterlambatan akibat koordinasi antarsatuan yang belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan. Terakhir, meskipun tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK telah dilakukan, waktu implementasi yang lebih lama dari target yang

ditentukan dapat berdampak pada evaluasi di audit berikutnya. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem pembaruan kebijakan, peningkatan pengawasan internal, penguatan kapasitas *SDM*, optimalisasi koordinasi rekonsiliasi, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi audit menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan opini *WTP* dari BPK RI.

Tabel 3. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban Responden	Implikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
1	Bagaimana peran Badan Keuangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan?	"Badan Keuangan memiliki mekanisme sosialisasi kebijakan keuangan secara berkala melalui pelatihan dan surat edaran. Selain itu, pemantauan dan audit internal dilakukan untuk memastikan kepatuhan. Namun, dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan sering terlambat diadopsi oleh satuan kerja akibat koordinasi yang kurang efektif."	Perlu sistem yang lebih cepat dan efektif dalam menyebarkan serta menerapkan kebijakan keuangan terbaru guna mencegah keterlambatan dalam implementasi. Digitalisasi dan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi dapat membantu mempercepat penyebaran informasi.
2	Apa tantangan utama dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)?	"Salah satu kendala utama adalah kurangnya personel dengan keahlian audit internal yang memadai. Selain itu, proses verifikasi transaksi keuangan sering mengalami keterlambatan karena beban kerja yang tinggi dan mekanisme pengawasan yang masih manual."	Diperlukan peningkatan kapasitas <i>SDM</i> dalam bidang audit internal melalui pelatihan dan sertifikasi profesional. Selain itu, optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam verifikasi transaksi.
3	Sejauh mana kualitas <i>SDM</i> dalam pengelolaan keuangan?	"Sebagian besar <i>SDM</i> memiliki pemahaman yang cukup baik dalam administrasi keuangan, tetapi masih ada kesenjangan dalam pemahaman teknis akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan aplikasi keuangan seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMNI)."	Dibutuhkan program pelatihan yang lebih berkelanjutan dan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi <i>SDM</i> khususnya dalam penggunaan sistem keuangan digital. Integrasi teknologi juga dapat membantu meminimalkan kesalahan akibat keterbatasan pemahaman teknis.
4	Bagaimana proses rekonsiliasi data keuangan di setiap unit kerja?	"Rekonsiliasi keuangan sering mengalami keterlambatan karena koordinasi antarunit yang belum optimal. Selain itu, perbedaan format pencatatan antarunit juga menyebabkan inkonsistensi dalam laporan keuangan yang menghambat proses penyusunan laporan final."	Diperlukan penyalarsan standar pencatatan keuangan antarunit serta sistem koordinasi yang lebih efektif, misalnya melalui platform digital yang memungkinkan akses data secara real-time. Penyeragaman proses administrasi juga dapat mempercepat rekonsiliasi.
5	Bagaimana efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK?	"Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK umumnya dilakukan, tetapi sering memerlukan waktu lebih lama dari yang ditargetkan. Hambatan utama berasal dari kompleksitas birokrasi dan keterbatasan anggaran dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang memerlukan perbaikan sistem atau tambahan personel."	Perlu strategi percepatan dalam implementasi rekomendasi audit dengan penyeragaman prosedur dan alokasi anggaran yang lebih fleksibel. Koordinasi lintas unit kerja juga perlu ditingkatkan agar tidak mempengaruhi opini audit berikutnya.

Berdasarkan Tabel 3, hasil wawancara dengan responden mengungkapkan bahwa Badan Keuangan telah memiliki mekanisme dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mempercepat implementasi kebijakan di seluruh unit kerja. Salah satu responden menyatakan bahwa "*Badan Keuangan secara rutin melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap regulasi, tetapi ada kendala dalam penyebarluasan informasi ke satuan kerja, terutama jika ada perubahan kebijakan yang bersifat teknis.*" Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada sistem pengawasan, masih terdapat keterlambatan dalam penyesuaian dengan regulasi terbaru, yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penerapan *Sistem Pengendalian Intern (SPI)*, beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan personel dengan kompetensi audit internal yang memadai serta proses verifikasi transaksi keuangan yang masih mengalami hambatan. Salah satu auditor internal menyampaikan

bahwa *"Meskipun ada mekanisme pengawasan, masih ada celah dalam validasi transaksi, terutama dalam dokumen pendukung yang terkadang tidak lengkap atau membutuhkan revisi ulang."* Hal ini menandakan bahwa efektivitas SPI masih perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas SDM serta penyempurnaan sistem validasi agar lebih akurat dan efisien dalam mendeteksi potensi kesalahan pencatatan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan juga menjadi perhatian, di mana sebagian besar personel memiliki pemahaman dasar yang cukup baik, tetapi masih terbatas dalam aspek teknis akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi keuangan. Seorang analis keuangan menjelaskan bahwa *"Kami sudah memahami prosedur penyusunan laporan, tetapi untuk aspek teknis seperti pencatatan berbasis akrual atau sistem keuangan berbasis digital, masih perlu lebih banyak pelatihan."* Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan kompetensi yang perlu diatasi melalui pelatihan berkelanjutan agar SDM lebih siap menghadapi perkembangan regulasi dan teknologi dalam sistem keuangan pemerintahan.

Tantangan lain yang ditemukan adalah dalam proses rekonsiliasi data keuangan antarunit kerja, di mana masih terdapat kendala dalam koordinasi dan perbedaan format pencatatan. Salah satu operator sistem keuangan mengungkapkan bahwa *"Sering kali, laporan dari unit kerja yang berbeda menggunakan format yang tidak seragam, sehingga butuh waktu lebih lama untuk melakukan rekonsiliasi."* Keterlambatan dalam proses ini dapat berdampak pada ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga diperlukan standar pencatatan yang seragam serta sistem koordinasi yang lebih efisien.

Efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK juga masih menjadi tantangan, terutama karena faktor kompleksitas birokrasi dan keterbatasan anggaran. Salah satu pejabat keuangan menyatakan bahwa *"Kami selalu menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi dalam beberapa kasus, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama dari yang ditargetkan karena adanya prosedur administratif yang harus dilalui."* Keterlambatan ini dapat berdampak negatif terhadap hasil audit berikutnya jika tidak segera ditangani dengan lebih efektif. Oleh

karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem birokrasi serta alokasi anggaran yang lebih fleksibel untuk mempercepat implementasi rekomendasi audit.

B. Pembahasan

Dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Laut menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan. Kontribusi Badan Keuangan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan sangat berpengaruh terhadap pencapaian standar laporan yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan. Namun, berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), implementasi kebijakan keuangan yang belum optimal, serta hambatan dalam sistem rekonsiliasi dan validasi transaksi, masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Penelitian ini mengungkap bahwa faktor-faktor tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan secara langsung mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK RI.

Hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keuangan telah diupayakan melalui berbagai mekanisme pengawasan dan sosialisasi kebijakan, tetapi dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih sering mengalami keterlambatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Sirait, dan Setiawan (2021), yang menyoroti bahwa kompetensi, motivasi, dan pelatihan dalam penggunaan aplikasi Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) berperan besar dalam meningkatkan kualitas kinerja personel dalam pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan TNI AL. Temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, upaya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan regulasi akan mengalami kendala signifikan.

Selain aspek kompetensi SDM, penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat celah dalam mekanisme verifikasi dan validasi

transaksi keuangan yang dapat berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Hadi, Bassang, dan Effendi (2024), yang menekankan bahwa optimalisasi kemampuan operator aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel di lingkungan TNI AL. Implementasi sistem berbasis digital seperti SAKTI memang telah membantu dalam meminimalisir kesalahan manual, tetapi tanpa pengawasan internal yang ketat, masih terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi keuangan.

Dalam kebijakan keuangan di institusi pemerintahan, penelitian oleh Bima Setia Budi (2024) mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 52 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi sering kali menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi dan efisiensi administrasi. Temuan ini relevan dengan penelitian ini, di mana proses rekonsiliasi data keuangan di UO TNI AL masih mengalami keterlambatan akibat kurang optimalnya koordinasi antarunit kerja. Perbedaan format pencatatan serta mekanisme koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Lebih lanjut, efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK juga menjadi tantangan dalam mempertahankan opini WTP. Dari wawancara dengan responden, ditemukan bahwa meskipun rekomendasi telah ditindaklanjuti, dalam beberapa kasus implementasinya masih memerlukan waktu yang lebih lama dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor kompleksitas birokrasi dan keterbatasan anggaran, yang juga menjadi temuan dalam penelitian Hananto (2021) mengenai strategi manajemen keuangan akuntabel di Mabes TNI. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran dan percepatan dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dalam institusi militer. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem birokrasi serta mekanisme pengalokasian anggaran yang lebih fleksibel guna

memastikan bahwa rekomendasi audit dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan efektif.

Dalam aspek implementasi sistem keuangan berbasis teknologi, penelitian Febrianto dan Soediantono (2022) menyoroti pentingnya penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan di industri pertahanan. Konsep ERP yang berbasis digital memungkinkan integrasi data keuangan secara real-time dan mengurangi risiko kesalahan manual dalam pencatatan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana penggunaan aplikasi seperti SIMAK-BMN dan SAKTI di lingkungan TNI AL telah membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, tanpa peningkatan keterampilan personel dalam penggunaan aplikasi tersebut, efektivitasnya masih belum optimal. Oleh karena itu, pelatihan intensif mengenai pemanfaatan sistem keuangan berbasis teknologi harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian oleh Samboga, Sasmito, dan Firdausi (2023) mengenai efektivitas sistem informasi manajemen akuntansi di Pangkalan TNI AL Malang juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi sangat bergantung pada kesiapan personel dalam memahami dan menerapkan teknologi tersebut. Dalam penelitian ini, meskipun sistem keuangan digital telah diterapkan, masih ada kesenjangan dalam keterampilan SDM yang menghambat optimalisasi penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelatihan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa seluruh personel keuangan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sistem yang digunakan.

Secara lebih luas, penelitian oleh Utomo, Setiawan, dan Hardiman (2024) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SAKTI dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian data keuangan. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa tanpa peningkatan kompetensi SDM, implementasi sistem keuangan digital tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mengintegrasikan pelatihan keuangan berbasis teknologi sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas personel di lingkungan TNI AL.

Dalam aspek budaya organisasi, penelitian Naz (2022) mengungkapkan bahwa tekanan

ketaatan, persepsi etis, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap audit judgment dalam institusi pemerintahan. Temuan ini relevan dalam penelitian ini, di mana budaya organisasi yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas akan berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, membangun budaya kepatuhan terhadap regulasi dan etika dalam pengelolaan keuangan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mempertahankan opini WTP.

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan di lingkungan UO TNI AL sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi SDM, efektivitas pengawasan internal, implementasi sistem keuangan berbasis teknologi, serta koordinasi dalam rekonsiliasi data keuangan. Tantangan dalam implementasi kebijakan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi audit BPK juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan opini WTP. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pelatihan teknis bagi personel keuangan, optimalisasi sistem pengendalian internal, percepatan reformasi birokrasi dalam implementasi rekomendasi audit, serta penguatan budaya organisasi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan UO TNI AL dapat semakin profesional dan berstandar tinggi, sehingga opini WTP dari BPK RI dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas laporan keuangan UO TNI Angkatan Laut guna mempertahankan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dari BPK RI. Meskipun telah diterapkan berbagai mekanisme pengelolaan keuangan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti keterlambatan dalam implementasi kebijakan terbaru, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam aspek teknis akuntansi pemerintahan, serta kurang optimalnya koordinasi dalam rekonsiliasi data keuangan. Selain itu, tantangan dalam penerapan *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit BPK juga menjadi faktor yang

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan dalam aspek kebijakan, pengawasan, kapasitas SDM, serta koordinasi antarunit menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan UO TNI Angkatan Laut.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan keberlanjutan opini WTP, Badan Keuangan perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, mempercepat penyebaran dan implementasi kebijakan keuangan terbaru dengan sistem komunikasi yang lebih efisien. Kedua, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada aspek teknis akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi keuangan. Ketiga, memperkuat *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* dengan memperbaiki mekanisme verifikasi transaksi dan validasi dokumen keuangan untuk meminimalkan potensi kesalahan pencatatan. Keempat, menyelaraskan standar pencatatan dan memperbaiki sistem koordinasi antarunit kerja untuk mempercepat proses rekonsiliasi keuangan. Terakhir, mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi audit BPK dengan menyederhanakan prosedur birokrasi dan memastikan alokasi anggaran yang mendukung percepatan implementasi rekomendasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan UO TNI Angkatan Laut semakin transparan, akuntabel, dan mampu mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, A., Sirait, B. M., & Setiawan, D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Penatausahaan SIMAK-BMN Terhadap Kualitas Kinerja Personil Disbeka TNI AL. *Rekayasa*, 14(2), 215-221.
- Bima Setia Budi, B. (2024). *ANALISIS PELAKSANAAN PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014 DI KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Eko Ibnu Hadi, S. E., Bassang, D. R. Y., & Sukarno Effendi, S. M. (2024). *OPTIMALISASI KEMAMPUAN OPERATOR APLIKASI SAKTI GUNA PENYUSUNAN LAPORAN*

- KEUANGAN DI JAJARAN KOARMADA IIIYANG AKUNTABEL DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN. *JURNAL ILMIAH KAJIAN KEANGKATANLAUTAN*, 6(1), 47-55.
- Febrianto, T., & Soediantono, D. (2022). Enterprise resource planning (ERP) and implementation suggestion to the defense industry: a literature review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(3), 1-16.
- Hananto, B. K. (2021). Strategi Manajemen Keuangan Akuntabel Mabes TNI Menghadapi Ancaman Militer. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(11), 1967-1988.
- Hayati, D. N. (2024). *Mekanisme Monitoring Capaian Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*.
- Hayong, N., Laekkeng, M., & Pramukti, A. (2024). Peran Akuntansi Manajemen dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Pusat Koperasi TNI AL Armada II Makassar. *Center of Economic Students Journal*, 7(4), 200-207.
- Naz, D. A. (2022). *Pengaruh Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu, Persepsi Etis, Senioritas Auditor Dan Budaya Organisasi Klien Terhadap Audit Judgment (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rizaldi. (2023). Implementasi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut Guna Pertahanan Ibu Kota Nusantara. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Rokhmawan, S., Susilowati, D., Hartanto, Y. A., & Kurniazain, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Kurikulum pada Pendidikan Prodi Teknik Mesin Kapal Perang di Akademi TNI Angkatan Laut Curriculum Policy in Warship Engineering Education Program at the Indonesia Navy Academy*.
- Samboga, E., Sasmito, C., & Firdausi, F. (2023). *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Tata Kelola Aset Milik Negara di Pangkalan TNI AL Malang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Setiawan, D., Madhakomala, R., & Cahyana, U. (2022). *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*. Penerbit Adab.
- Subhan, A., Faisol, A., & Kristiyono, K. (2024). Pembangunan Industri Pertahanan dalam Peningkatan Alutsista TNI Angkatan Laut di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8403-8407.
- Utomo, I. A. C., Setiawan, D., & Hardiman, H. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sakti dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Penyajian Data Keuangan LAKIP TA 2023 di RSPAL dr. Ramelan Surabaya. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 105-120.